



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)  
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267  
Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Yayasan Budi Yasa Kerti Nomor 02/Y/II/2021, tanggal 24 Februari 2021, Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan pada Izin Operasional dari Yayasan Yasa Dharma Kerti menjadi Yayasan Budi Yasa Kerti yang berlokasi di Jl.Taman Giri, Gang Banteng V Nomor 3, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan Nomor 421.1/068/UPT.Disdikpora , tanggal 17 Februari 2021, beserta lampiran-lampirannya;
  - b. bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim Survey Nomor 18/PAUD-PNF/III/2021, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2021 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga      | : <b>TK. GAYATRI</b>   |
| Rumpun Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   |
| Jenis Pendidikan  | : <b>Taman Kanak-Kanak ( TK )</b>  |
| Alamat            | : Jalan Taman Giri, Gang Banteng V No.3, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung |
| Penyelenggara     | : Yayasan Budi Yasa Kerti  |

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 3 Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



J MADE MANDI, S.Pd., M.Pd  
PEMBINA TINGKAT I, IV/b  
Nip. 19640227 198804 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Selatan.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kec.Kuta Selatan.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024380.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BUDHI YASA KERTI

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUDHI YASA KERTI tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020120751100774 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUDHI YASA KERTI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BUDHI YASA KERTI  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris berkedudukan di KOTA DENPASAR.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024380.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BUDHI YASA KERTI

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA                    | NO KTP / PASSPORT |
|-------------------------|-------------------|
| DRS. I WAYAN SOLO, MSI  | 5103050910600005  |
| NI WAYAN SANTIASIH, SPD | 5103056002700008  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                    | NO KTP/PASSPORT  | ORGAN YAYASAN | JABATAN    |
|-------------------------|------------------|---------------|------------|
| DRS. I WAYAN SOLO, MSI  | 5103050910600005 | PEMBINA       | KETUA      |
| NI WAYAN SANTIASIH, SPD | 5103056002700008 | PEMBINA       | ANGGOTA    |
| I NYOMAN KERTYASA, SPD  | 5103050305560002 | PENGURUS      | KETUA      |
| I KOMANG ASTIKA YASA    | 5103050902910002 | PENGURUS      | SEKRETARIS |
| I WAYAN GEDOR           | 5103050609630009 | PENGURUS      | BENDAHARA  |
| I KETUT MONTOG          | 5103051103720003 | PENGAWAS      | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031750.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 08 Desember 2020